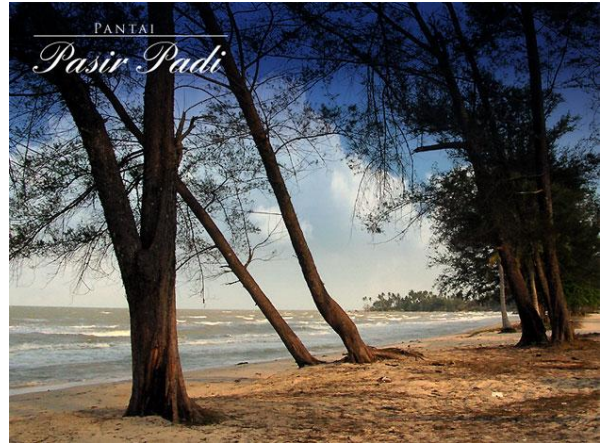


BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan. Strategi disusun secara umum untuk menjadi panduan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan evaluasi agenda-agenda pembangunan.

Strategi pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro yang ada di daerah. Oleh karena itu, sebelum masuk pada strategi pembangunan, perlu diuraikan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Kekuatan

- a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah daerah kepulauan yang terletak di posisi strategis, yakni menjadi lintasan bagi pelayaran nasional yang dapat menjadi penghubung bagi pelabuhan-pelabuhan utama di kawasan Indonesia bagian Barat. Gugusan Kepulauan Bangka Belitung menjadi lintasan pelayaran antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Riau.
- b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam, seperti timah, pasir kuarsa, granit, dan sebagainya. Provinsi ini juga memiliki potensi perikanan darat dan laut yang relatif besar.
- c. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki potensi keindahan alam yang dapat menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pengembangan industri pariwisata.
- d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi baru yang sedang tumbuh sebagai kawasan baru yang potensial.
- e. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk yang relatif harmonis di tengah pluralitas yang damai dalam prinsip 'Serumpun Sebalai'.

2. Kelemahan

- a. Kondisi geografis berupa kepulauan menjadikan provinsi ini memiliki keterbatasan dalam akses antardaerah. Keterbatasan moda transportasi antardaerah menyulitkan akses antara dua pulau besar, yaitu Bangka dan Belitung, juga pulau-pulau disekelilingnya.
- b. Ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.
- c. Banyaknya lahan-lahan bekas tambang dan lahan yang tidak produktif.
- d. Masih tingginya kesenjangan antara desa-kota.
- e. Minimnya koordinasi antar pemerintah daerah dan antar *stakeholders*.
- f. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata sebagai alternatif baru pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- g. Sistem birokrasi daerah yang relatif belum efisien dan efektif dengan patologi birokrasi yang cenderung masih mengakar. Masih perlu reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

3. Peluang

- a. Pengembangan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan internasional bagi jalur perdagangan lokal dan global.
- b. Pengembangan industri hilir bagi berbagai kekayaan alam daerah yang selama ini belum tergarap optimal. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi untuk menjadi kawasan industri baru.
- c. Pengembangan dunia pariwisata sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat pasca timah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.
- d. Alih fungsi lahan bekas tambang sebagai lahan produktif dan sebagai lokasi penelitian dan lahan rekayasa sosial.
- e. Peluang untuk muncul sebagai daerah yang strategis, cepat tumbuh, dan berdaya saing tinggi.

4. Ancaman

- a. Krisis lingkungan dan ekspansi pertambangan yang tidak pro lingkungan.
- b. Kerawanan sosial, seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan anak, dan daerah transit kejahatan lainnya.

Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digambarkan dalam **Tabel 6.1** berikut ini.

Tabel 6.1
Analisis Faktor Internal dan Eksternal untuk Perumusan
Strategi dan Arah Kebijakan

Internal	Eksternal
(1)	(2)
Kekuatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah daerah kepulauan yang terletak di posisi strategis, yakni menjadi lintasan bagi pelayaran nasional yang dapat menjadi penghubung bagi pelabuhan-pelabuhan utama di kawasan Indonesia bagian Barat. Gugusan Kepulauan Bangka Belitung menjadi lintasan pelayaran antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam, seperti timah, pasir kuarsa, granit, dan sebagainya. Provinsi ini juga memiliki potensi perikanan darat dan laut yang relatif besar. c. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki potensi keindahan alam yang dapat menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pengembangan industri pariwisata. d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi baru yang sedang tumbuh sebagai kawasan baru yang potensial. e. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk yang relatif harmonis di tengah pluralitas yang damai dalam prinsip 'Serumpun Sebalai'. 	Peluang: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan internasional bagi jalur perdagangan lokal dan global. b. Pengembangan industri hilir bagi berbagai kekayaan alam daerah yang selama ini belum tergarap optimal. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi untuk menjadi kawasan industri baru. c. Pengembangan dunia pariwisata sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat pasca timah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. d. Alih fungsi lahan bekas tambang sebagai lahan produktif dan sebagai lokasi penelitian dan lahan rekayasa sosial. e. Peluang untuk muncul sebagai daerah yang strategis, cepat tumbuh, dan berdaya saing tinggi.
Kelemahan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi geografis berupa kepulauan menjadikan provinsi ini memiliki keterbatasan dalam akses antardaerah. Keterbatasan moda transportasi antardaerah menyulitkan akses antara dua pulau besar, yaitu Bangka dan Belitung, juga pulau-pulau disekelilingnya. b. Ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. c. Banyaknya lahan-lahan bekas tambang dan lahan yang tidak produktif. d. Masih tingginya kesenjangan antara desa-kota. e. Minimnya koordinasi antar pemerintah daerah dan antar <i>stakeholders</i>. f. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata sebagai alternatif baru pertumbuhan ekonomi masyarakat. g. Sistem birokrasi daerah yang relatif belum efisien dan efektif dengan patologi birokrasi yang cenderung masih mengakar. Masih perlu reformasi birokrasi secara berkelanjutan. 	Ancaman: <ul style="list-style-type: none"> a. Krisis lingkungan dan ekspansi pertambangan yang tidak pro lingkungan. b. Kerawanan sosial, seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan anak, dan daerah transit kejahatan lainnya

Sumber : Analisis Tim Perumus RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan sebagai berikut :

Misi I

Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/ kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektor, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses permodalan kepada masyarakat, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional, yang dilaksanakan agar meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM dan kelembagaan ekonomi lainnya.
 - b. Perluasan aksesibilitas permodalan melalui kredit usaha dan bantuan modal bagi masyarakat.
 - c. Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi.
 - d. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama perdagangan
 - e. Pengembangan promosi produk - produk unggulan daerah
 - f. Peningkatan ketahanan pangan daerah
 - g. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - h. Peningkatkan DBH di sektor tambang dalam pengembangan perekonomian di Babel
 - i. Pengembangan program CSR/CD dalam mendukung perekonomian Bangka Belitung termasuk pengembangan pariwisata

2. Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan, dilakukan agar meningkatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kapasitas SDM
3. Meningkatkan pemberdayaan usaha skala mikro dan kecil, dilakukan agar tersedianya lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan skala kecil se-Babel
 - b. Peningkatan aksesibilitas pangan baik akses pangan perdesaan dan perkotaan
 - c. Pengembangan usaha kecil dan menengah dalam mendukung konversi Mitan ke LPG 3 Kg.
4. Mengembangkan desa mandiri yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru, dilakukan agar berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Pembentukan OVOP
 - b. Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian dan pariwisata provinsi kepulauan Bangka Belitung
 - c. Pengembangan desa mandiri pangan.
 - d. Pengembangan kawasan integrasi ternak dan tanaman.
 - e. Penanganan daerah rawan pangan
 - f. Pengembangan Desa Mandiri Energi dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil dan desa-desa wisata
 - g. Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru terbarukan;
 - h. Penyediaan data dan informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

Misi II

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :

1. Harmonisasi dan integrasi program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dilakukan agar meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, peningkatan kualitas pemerintahan desa/ kelurahan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan;
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender;
 - d. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - e. Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum;
 - f. Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda yang mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan pariwisata daerah;
 - g. Pemassalan olahraga dan pembinaan prestasi olah raga;
 - h. Peningkatan Kerukunan Bermasyarakat, Beragama, Berbangsa dan Bernegara;
 - i. peningkatan kualitas budaya berbasis agama ;
 - j. Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS) dan Berbasis Masyarakat pada setiap jenjang Pendidikan;
 - k. Peningkatan Peran Masyarakat di daerah tujuan Wisata;
 - l. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;

- m. Peningkatan kreatifitas dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film;
 - n. Peningkatan kesadaran dan pemahaman multikultur serta kearifan lokal;
 - o. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Sejarah serta Penguatan jati Diri dan Karakter Bangsa;
 - p. Peningkatan ketahanan dan apresiasi budaya.
2. Menyusun kebijakan terkait dengan peningkatan derajat hidup masyarakat, dilakukan agar terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
- a. Pengembangan budaya membaca dan menulis, serta pembinaan perpustakaan;
 - b. Peningkatan SDM Kearsipan, Sadar Arsip dan Pelayanan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi;
 - c. Percepatan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. Pengembangan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar;
 - e. Peningkatan layanan pendidikan disemua jenjang pada masyarakat;
 - f. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
3. Pemenuhan terhadap kualitas tenaga pengajar, tenaga kesehatan serta rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat, dilakukan agar meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
- a. Peningkatan kualitas pendidikan, baik mutu pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana maupun system dan manajemen pendidikan;
 - b. Peningkatan alokasi beasiswa semua jenjang pendidikan bagi pelajar/mahasiswa kurang mampu;
 - c. Pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat.
4. Mewujudkan kualitas Jamkesmas, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan raskintis, dilakukan agar meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :

- a. Pemberian beras gratis kepada masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan pembiayaan dan kualitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
5. Menciptakan program perlindungan dan bantuan social serta lapangan pekerjaan, dilakukan agar meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
- a. Pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS;
 - b. Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - c. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak TK dan Wirausaha baru yang berdaya saing;
 - d. Perluasan Penciptaan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja baik di dalam maupun d luar negeri;
 - e. Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis;
 - f. Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pengawasan Tenaga Kerja, K3, Serta Penegakan Hukum;
 - g. Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri;
 - h. Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;
 - i. Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal.
6. Menyusun program penanggulangan kemiskinan yang merupakan kebijakan multisektoral/multibidang, dilakukan agar meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
- a. Penanggulangan kemiskinan dan kelompok rawan sosial dengan sinergisitas semua sektor;
 - b. Peningkatan perencanaan dan koordinasi terhadap terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan;
 - c. Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Misi III

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi, akan ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

1. Mengendalikan pencemaran lingkungan, dilakukan agar terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi tingkat pencemaran.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dilakukan agar terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Pengelolaan sumber daya alam untuk mengendalikan sampah dan lahan perkotaan.
3. Meningkatkan kualitas serta akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dilakukan agar terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan berkonsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
4. Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dilakukan agar berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan Meningkatkan daya dukung dan daya lenting lingkungan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan , pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokalitas untuk mengendalikan dampak lingkungan.

5. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dilakukan agar berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan Meningkatkan daya dukung dan daya lenting lingkungan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Pemanfaatan lahan agar menjadi kawasan produktif dan ekonomis untuk melindungi kerusakan SDA;
 - b. Percepatan rehabilitasi lahan kritis di darat dan laut disertai dengan pengawasan yang ketat untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6. Melaksanakan pembangunan berbasis wilayah/spasial dan sektoral dalam sinergi pusat dan daerah, dilakukan agar terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokal untuk mencegah dampak negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Misi IV

Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global, akan ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan, daerah terpencil, dan pulau-pulau kecil, agar meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan aksesibilitas serta mendukung pengembangan pariwisata daerah yang berdaya saing sebagai pondasi pengembangan ekonomi wilayah;
 - b. Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi, layanan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;

- c. Pemerataan akses teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk memberikan sarana informasi kepada masyarakat serta mendukung perkembangan pariwisata;
 - d. Pemenuhan energi di pulau-pulau kecil untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata;
 - e. Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau untuk meningkatkan transportasi barang dan orang serta juga mendukung perkembangan pariwisata.
2. Meningkatkan pelayanan infrastruktur dalam mendukung daya saing sector riil, agar meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
- a. Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur guna mendukung daya saing sektor riil;
 - b. Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi.
3. Mengembangkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dilakukan agar meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
- a. Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infratraktur sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.
4. Mempercepat pengembangan infrastuktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh, dilakukan agar meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
- a. Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan;
 - b. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/kota sebagai upaya untuk mengembangkan daerah potensial dan pengembangan potensi lokal;

- c. Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka.
- 5. Menetapkan dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus, dilakukan agar berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
 - a. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung).
 - b. Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota;
- 6. Meningkatkan dukungan terhadap MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Wilayah Sumatera, dilakukan agar berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
 - a. Pelaksanaan program MP3EI di wilayah Sumatera untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi;
 - b. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara, dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah;
 - c. Peningkatan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara Internasional Paling lambat tahun 2017 untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan;
 - d. Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kelian Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai upaya mendukung pengembangan Kawasan Perhatian Investasi;
 - e. Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah.
- 7. Mendorong percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah potensial, dilakukan agar berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
 - a. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal;
 - b. Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional;

- c. Pengembangan Desa-desa pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata;
- d. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang professional, akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur;
- e. Percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah potensial lainnya sebagai upaya untuk pengembangan kawasan strategis dan pengembangan potensi lokal di Bangka Belitung;
- f. Rintisan Pelabuhan Tanjung Berikat - Tanjung Batu sebagai upaya untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;
- g. Peningkatan dan pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang sebagai upaya untuk menciptakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Misi V

Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung, akan ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

1. Menata kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang efektif dan efisien, agar terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
 - a. Penguatan Kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang berbasis Standar Pelayanan Minimal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan aparatur;
 - b. Peningkatan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat;
 - c. Peningkatan Penegakan peraturan kepegawaian secara tegas dengan menerapkan sistem "*reward and punishment*";
 - d. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan;

- e. Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan *e-goverment* dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien
- 2. Menyusun Peraturan Daerah yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
 - a. Penguatan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- 3. Menegakkan "*rule of law*" dengan adanya kepastian hukum yang dimulai dari proses pembuatan, penjabaran, pengawasan, hingga penegakan aturan hukum, dilakukan agar terwujudnya proses pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kontrol lembaga non-pemerintah untuk mengawasi kinerja pemerintah.
- 4. Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh, dilakukan agar meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
 - a. Percepatan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh.

Arah kebijakan adalah arah tindakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, terdapat beberapa tahapan kebijakan yang menandai adanya proses pencapaian tujuan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, terlihat bahwa arah kebijakan ditujukan pada penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, arah kebijakan ditujukan pada terwujudnya wilayah agri-bahari yang berwawasan lingkungan dengan didukung

oleh sumber daya manusia yang handal dan pemerintahan yang amanah menuju masyarakat sejahtera.

Berdasarkan arah kebijakan jangka menengah tersebut, maka pembangunan pada **tahun pertama** diarahkan untuk melanjutkan dan menguatkan konsolidasi antarpemangku kepentingan dalam rangka memperkuat program-program yang sudah berlangsung dan melakukan berbagai pengembangan-pengembangan dan inovasi yang kontekstual. Tahun pertama ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai jenjang pelayanan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan perumusan kebijakan pemerintahan.

Tahun kedua pembangunan diarahkan pada Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi produktif, meningkatnya investasi, dan menguatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tahun kedua juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan di berbagai kawasan, dan koordinasi atas pengelolaan lingkungan hidup.

Tahun ketiga diarahkan pada upaya melanjutkan pengembangan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan keadilan di berbagai kawasan. Tahun ketiga juga ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat di berbagai kalangan. Berbagai paket kebijakan pada tahun ketiga ini lebih diintensifkan. Evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan tahun setelahnya dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan adanya pencapaian pembangunan pada akhir periode perencanaan.

Tahun keempat diarahkan untuk mengevaluasi kinerja program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang merata di semua kawasan, sinkronisasi pembangunan antarlevel pemerintahan daerah, dan memantapkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, dan kualitas layanan pemerintahan yang semakin baik.

Tahun kelima diarahkan untuk memastikan ketercapaian prinsip kemandirian, kemajuan, dan keadilan yang didasarkan pada daya saing yang optimal yang didukung oleh sinergi antardaerah dan meratanya hasil pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Tahun kelima ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terberdayanya masyarakat melalui partisipasi di berbagai jenjang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terkelolanya lingkungan hidup dengan baik, terciptanya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan per misi diuraikan pada Tabel 6.2 sebagai berikut.

Tabel 6.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Misi 1 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan				
1	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah	Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.	Meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses permodalan kepada masyarakat, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.	<p>Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM dan kelembagaan ekonomi lainnya.</p> <p>Perluasan aksesibilitas permodalan melalui kredit usaha dan bantuan modal bagi masyarakat.</p> <p>Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi.</p> <p>Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama perdagangan</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Pengembangan promosi produk - produk unggulan daerah
				Peningkatkan DBH di sektor tambang dalam pengembangan perekonomian di Babel
				Pengembangan program CSR/CD dalam mendukung perekonomian Bangka Belitung termasuk pengembangan pariwisata.
				Peningkatan kapasitas SDM
		Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.	Mengembangkan desa mandiri yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru.	Pembentukan OVOP
				Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian dan pariwisata provinsi kepulauan Bangka Belitung
				Pengembangan desa mandiri pangan.
				Pengembangan kawasan integrasi ternak dan tanaman.
				Pengembangan Desa Mandiri Energi dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil dan desa-desa wisata
				Penyediaan data dan informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
2	Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran 2. Meningkatnya daya beli masyarakat 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. 	Meningkatkan pemberdayaan usaha skala mikro dan kecil.	Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan skala kecil se-Babel

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Peningkatan aksesibilitas pangan baik akses pangan perdesaan dan perkotaan Peningkatan ketahanan pangan daerah Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru terbarukan; Pengembangan ruang usaha kecil dan menengah dalam mendukung konversi Mitan ke LPG 3 Kg.
Misi 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)				
1	Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)	Menyusun kebijakan terkait dengan peningkatan derajat hidup masyarakat	Percepatan derajat kesehatan masyarakat; Pengembangan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar; Peningkatan layanan pendidikan disemua jenjang pada masyarakat; Pengembangan budaya membaca dan menulis, serta pembinaan perpustakaan; Peningkatan SDM Kearsipan, Sadar Arsip dan Pelayanan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi;
			Mewujudkan kualitas Jamkesmas, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan raskintis.	Pemberian beras gratis kepada masyarakat miskin; Peningkatan pembiayaan dan kualitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Menyusun program penanggulangan kemiskinan yang merupakan multisektoral/multibidang	Penanggulangan kemiskinan dan kelompok rawan sosial dengan sinergisitas semua sektor;
				Peningkatan perencanaan dan koordinasi terhadap terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan;
				Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi;
				Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia.	Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Harmonisasi dan integrasi program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, peningkatan kualitas pemerintahan desa/ kelurahan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan;
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
				Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender;
				Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
				Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum;
				Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda yang mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan pariwisata daerah;

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Pemassalan olahraga dan pembinaan prestasi olah raga;
				Peningkatan Kerukunan Bermasyarakat, Beragama, Berbangsa dan Bernegara;
				Peningkatan kualitas budaya berbasis agama ;
				Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS) dan Berbasis Masyarakat pada setiap jenjang Pendidikan;
				Peningkatan Peran Masyarakat di daerah tujuan Wisata;
				Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
				Peningkatan kreatifitas dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film;
				Peningkatan kesadaran dan pemahaman multikultur serta kearifan lokal;
				Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Sejarah serta Penguatan jati Diri dan Karakter Bangsa;
				Peningkatan ketahanan dan apresiasi budaya.
		Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.	Pemenuhan terhadap kualitas tenaga pengajar, tenaga kesehatan serta rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat.	Peningkatan kualitas pendidikan, baik mutu pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana maupun system dan manajemen pendidikan;

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Peningkatan alokasi beasiswa semua jenjang pendidikan bagi pelajar/mahasiswa kurang mampu;
				Pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat.
		Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.	Menciptakan program perlindungan dan bantuan social serta lapangan pekerjaan.	Pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS;
				Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
				Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak TK dan Wirausaha baru yang berdaya saing;
				Perluasan Penciptaan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja baik di dalam maupun d luar negeri;
				Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis;
				Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pengawasan Tenaga Kerja, K3, Serta Penegakan Hukum;
				Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri;
				Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;
				Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan Mengendalikan tata ruang				
1	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas LH dan tata ruang yang sesuai peruntukan.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.	Mengendalikan Pencemaran Lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi tingkat pencemaran..
				Pengelolaan sumber daya alam untuk mengendalikan sampah dan lahan perkotaan.
			Meningkatkan Kualitas serta Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;	Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan berkonsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
				Pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan , pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokalitas untuk mengendalikan dampak lingkungan.
		Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Mengembangkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;	Pemanfaatan lahan agar menjadi kawasan produktif dan ekonomis untuk melindungi kerusakan SDA;
			Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	Percepatan rehabilitasi lahan kritis di darat dan laut disertai dengan pengawasan yang ketat untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
2	Menguatkan kemitraan dan partisipasi aktif antar stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Melaksanakan Pembangunan berbasis wilayah/spasial dan sektoral dalam sinergi pusat dan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokal untuk mencegah dampak negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Misi 4 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh				
1	Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan.	<p>Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan aksesibilitas serta mendukung pengembangan pariwisata daerah yang berdaya saing sebagai pondasi pengembangan ekonomi wilayah;</p> <p>Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi, layanan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>Pemerataan akses teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk memberikan sarana informasi kepada masyarakat serta mendukung perkembangan pariwisata;</p> <p>Pemenuhan energi di pulau-pulau kecil untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata;</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau untuk meningkatkan transportasi barang dan orang serta juga mendukung perkembangan pariwisata.
			Meningkatkan pelayanan infrastruktur dalam mendukung daya saing sector riil.	Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur guna mendukung daya saing sektor riil;
				Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi.
2	Mendorong Mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.	Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.	Mengembangkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).	Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.
			Mempercepat pengembangan infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh.	Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan;
				Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/kota sebagai upaya untuk mengembangkan daerah potensial dan pengembangan potensi lokal;
				Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka.
			Menetapkan dan Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung).

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota.
			Dukungan terhadap MP3EI (Masterplan Mempercepat Memperluas Pembangunan Ekonomi Indonesia) Wilayah Sumatera.	Pelaksanaan program MP3EI diwilayah Sumatera untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi;
				Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara, dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah;
				Peningkatan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara Internasional Paling lambat tahun 2017 untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan;
				Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kelian Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai upaya mendukung pengembangan Kawasan Perhatian Investasi;
				Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah.
			Mendorong percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah potensial	Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal;

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				<p>Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional;</p> <p>Pengembangan Desa-desa pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata;</p> <p>Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang profesional, akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur;</p> <p>Percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah potensial lainnya sebagai upaya untuk pengembangan kawasan strategis dan pengembangan potensi lokal di Bangka Belitung;</p> <p>Rintisan Pelabuhan Tanjung Berikat - Tanjung Batu sebagai upaya untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;</p> <p>Peningkatan dan pengembangan kawasan KTM Batu Betumpang sebagai upaya untuk menciptakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru.</p>
Misi 5 : Mewujudkan <i>good governance</i> dalam rangka mencapai <i>clean government</i>				
1.	Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Menata kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang efektif dan efisien.	<p>Penguatan Kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang berbasis Standar Pelayanan Minimal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan aparatur;</p> <p>Peningkatan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat;</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Peningkatan kepegawaian menerapkan sistem "reward and punishment" ;
				Penegakan peraturan secara tegas dengan sistem "reward and punishment" ;
				Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan;
			Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan e-government dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien	
			Menyusun Peraturan Daerah yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.	Penguatan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat
			Menegakkan "rule of law" dengan adanya kepastian hukum yang dimulai dari proses pembuatan, penjabaran, pengawasan, hingga penegakan aturan hukum.	Peningkatan kontrol lembaga non-pemerintah untuk mengawasi kinerja pemerintah.
			Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh	Percepatan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh.